



Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government

Fathiyah¹, Iskandar Nasution², Bambang Niko Pasla³, Fahmi Rasid⁴, Muhammad Arif⁵

¹Universitas Batanghari Jambi, Indonesia

²Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Indonesia

³Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

⁵Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Indonesia

Abstract

Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the ratio of regional dependent and independent in measuring the financial capacity of the Jambi Provincial Government for the 2016 - 2020 Fiscal Year. **Background Problems:** How big is the ratio of the contribution of Regional Original Revenue (PAD) to transfer funds from the center in the Jambi Provincial Government APBD in funding development financing for 2016-2020?. **Research Methods:** The research is quantitative using secondary data in the form of Regional Original Income and transfers funds from the Jambi Province Government Budget Realization Report for the 2016-2020 Fiscal Year. **Finding/Results:** Based on the results of the ratio analysis, the degree of financial dependence of the Jambi Provincial Government in the 2016-2020 fiscal year is classified as moderate, with an average overall ratio of 63.60%, meaning that the Jambi Provincial Government in carrying out development financing is still dependent on transfer funds from the center. Meanwhile, the degree of regional financial independence is also classified as moderate/participatory, with an average overall ratio of 57.13%. **Conclusion:** The contribution of regional Original Revenue in funding development financing cannot be entirely relied upon and still relies on transfer funds from the center.

Keywords: Regional finance; Dependent and independent variable; Regional Original Revenue; Quantitative data collection methods; Measure of financial performance

Abstrak

Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio ketergantungan dan kemandirian daerah dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020. **Latar belakang Masalah:** Seberapa besarkah rasio kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap dana transfer dari pusat pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendanai pembiayaan pembangunan tahun 2016-2020. **Metode Penelitian:** Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016-2020. **Temuan/Hasil:**

Corresponding author's email: fathiyahzaky74@gmail.com

This is an open-access article distributed under the terms a CC By-SA 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Berdasarkan hasil analisis rasio tersebut derajat ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2016–2020 tergolong sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 63,60% artinya Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembiayaan pembangunan masih bergantung dengan Dana transfer dari Pusat. Sedangkan untuk derajat kemandirian Keuangan daerahnya juga tergolong sedang/Partisipatif dengan rata-rata rasio keseluruhan 57,13%. **Kesimpulan:** Kontribusi Pendapatan Asli daerah dalam mendanai pembiayaan pembangunan belum bisa sepenuhnya diandalkan dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

Kata Kunci: Keuangan daerah; Variabel ketergantungan dan kemandirian; Pendapatan Asli Daerah; Metode pengumpulan data kuantitatif; Ukuran kinerja keuangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), maka tugas pemerintah provinsi selanjutnya adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dilakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kemendagri (Sari et al. 2020; Monginsidi et al. 2021). Hasil evaluasi nantinya akan menjadi penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan sebagai bahan untuk melaksanakan perubahan APBD pada tahun berjalan (Hardiningsih et al. 2021; Tambun et al. 2021). Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai *leading* sektor yang melakukan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar kedepannya pengelolaan dan pelaksanaan APBD menjadi lebih terencana, baik dan teratur (Juni et al. 2021; Rachmad 2021). Pemerintah Provinsi

Jambi dalam pengelolaan anggaran masih belum optimal terutama sekali yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah, hal ini bisa terlihat dengan target dan realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Jambi terutama pada Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat kecil serta masih banyak bergantung pada dana-dana transfer dari pusat, padahal penerimaan dari Pendapatan Asli daerah ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.. Akibat dari belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah ini menyebabkan realisasi pendapatan asli daerah menjadi sangat kecil padahal sebenarnya potensi itu ada dan cukup besar hanya saja belum tergali, akibatnya dana untuk pembiayaan pembangunan menjadi lebih kecil dan harus bergantung dengan pendapatan transfer dari pusat, ini artinya tingkat kemandirian keuangan daerahnya juga masih sangat kecil (Karenina et al. 2021). Disamping itu Pemerintah Provinsi Jambi juga belum mempunyai inovasi baru dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diluar dari pajak dan retribusi. Hal lain yang menyebabkan rendahnya realisasi ini

diantaranya adalah adanya penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah yang ternyata belum juga optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer menjadi lebih kecil dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar (Erlinda, 2016). Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang dengan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menjadi lebih tinggi dan meningkat.

Penelitian tentang rasio ketergantungan dan kemandirian daerah pernah penulis lakukan dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi periode 2013 – 2014 dengan kesimpulan hasil penelitiannya adalah bahwa hampir semua kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat dengan tingkat rasio kemandirian sangat rendah yaitu dibawah angka 10%. Penelitian yang sama lainnya juga dilakukan oleh Rico Putra dkk (2016) dengan

lokasi Pemerintah Provinsi Jambi periode penelitian 2008 – 2014 dan menyimpulkan hasil penelitiannya adalah rasio ketergantungan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi cukup besar terhadap dana transfer dengan nilai rasio kemandirian pada kategori sedang/Partisipatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kaunang dkk (2016), Ai Siti Farida dkk (2019) dan Prakoso dkk (2019) yang meneliti pada beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi yang berbeda di Indonesia dan semua hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketergantungan Pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat sangat besar dengan tingkat rasio kemandirian pada kategori instruktif/sangat rendah Merujuk pada uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lanjutan tentang kemampuan keuangan daerah dilihat dari ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer serta tingkat kemandirian pengelolaan keuangan daerah dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Provinsi Jambi pada Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran tahun 2016 - 2020 dengan menggunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah rasio ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer pada

APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020 ?

2. Seberapa besarkah rasio kemandirian daerah Pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui besarnya rasio ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020.
2. Untuk mengetahui besarnya rasio kemandirian daerah pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020.

TINJAUAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah (Renowijoyo, 2010).

Kuangan daerah yang tercermin dalam APBD Pemerintah provinsi Jambi sebagai sumber pembiayaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lain-lain yang Sah. (Perda Pertanggungjawaban APBD, 2016 - 2020)

Sumber pendapatan Pemerintah Daerah relatif dapat terprediksi karena pendapatan tersebut diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan perundangan berhak memungut pajak dan retribusi daerah. Bahkan pemerintah daerah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh pajak dengan demikian dapat diperoleh pendapatan secara optimal. (Mahmudi, 2010; Pasla, 2009). Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan adanya desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi tetap berada dalam koridor hukum Negara Kesatuan republik Indonesia. Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber Penerimaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan

- d. Lain-lain PAD yang sah
2. Transfer pemerintah pusat
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil Sumber Daya Alam
 - c. Dana alokasi umum
 - d. Dana alokasi khusus
 - e. Dana otonomi khusus
 - f. Dana penyesuaian
3. Transfer pemerintah provinsi
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil sumber daya alam
 - c. Bagi hasil lainnya
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga kini baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan secara signifikan, tetapi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan secara umum Penerimaan PAD mengalami peningkatan secara signifikan pada era otonomi.

Walaupun PAD mengalami peningkatan secara signifikan tetapi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik diperoleh fakta bahwa bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana

perimbangan yang mencapai 75-94%, sementara PAD secara rata-rata nasional hanya memberikan kontribusi antara 6-15% dari pendapatan daerah (Mahmudi, 2010)

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut : (Mahmudi, 2013):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 1. Tingkat Kemandirian keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2001)

METODE

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020. Data yang tersedia kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah.

HASIL dan PEMBAHASAN

Rasio Ketergantungan Daerah terhadap Pendapatan Transfer pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020. Untuk melihat tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Tingkat rasio ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2016-2020

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio (%)
2016	2.159.679.608.454	3.394.795.872.563	63,62
2017	2.723.260.588.950	4.311.792.610.112	63,16
2018	2.754.346.967.999	4.412.464.565.281	62,42
2019	2.922.494.905.401	4.582.514.394.709	63,77
2020	2.862.888.575.956	4.400.624.372.119	65,06
Rata-Rata Rasio			63,60

Sumber: Rekapitulasi RLA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa derajat ketergantungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap dana transfer pada Tahun anggaran 2016 - 2020 dalam kategori sedang dengan rasio rata- rata sebesar 63,60%, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana-dana transfer dari pusat masih tinggi/sedang yang artinya

Pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pendanaan pembangunan pada lima tahun terakhir ini adalah sebesar 63,60% masih harus dibiayai dari dana transfer/pusat.

Masih tingginya derajat ketergantungan ini karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD nilainya kecil dan masih bergantung dengan dana transfer dari pusat. Rasio Kemandirian Daerah pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 – 2020.

Untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 – 2020, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Tingkat rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)
2016	1.233.514.664.109	2.159.679.608.454	57,12
2017	1.580.304.867.342	2.723.260.588.950	58,03
2018	1.656.569.597.282	2.754.346.967.999	60,14
2019	1.658.411.489.308	2.922.494.905.401	56,75
2020	1.535.183.487.238	2.862.888.575.956	53,62
Rata-Rata Rasio			57,13

Sumber: Rekapitulasi LRA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata derajat kemandirian Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2016 - 2020 dalam kategori sedang dengan rata-rata rasio keseluruhan sebesar 57,13%, ini artinya kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi

masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan dana transfer dalam membiayai kegiatan pembangunan hanya sebesar 57,13%.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

1. Derajat ketergantungan Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2016 – 2020 tergolong rendah yaitu dengan rata-rata rasio sebesar 63,60%, artinya pada periode tersebut derajat ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan masih pada kisaran 63,60% dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.
2. Derajat kemandirian pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 – 2020 dalam kategori sedang yaitu dengan rata-rata rasio keseluruhan 57,13% artinya pada periode tersebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan dana transfer dalam membiayai pembangunan daerah masih rendah yaitu hanya sebesar 57,13% pada periode Tahun 2016 - 2020.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat meningkatkan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pusat.
2. Ada upaya dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru disamping mengoptimalkan

Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada, misalnya dengan membuat regulasi dan kebijakan dalam memungut penerimaan yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah

3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baik dari pajak, retribusi ataupun PAD lainnya dan memutus rantai birokrasi yang dapat menghambat penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, F., Ahadiat, A., & Ribhan, R. (2020). Financial performance of Bandar Lampung City Government (Comparing the accountability of two mayor periods: 2006–2010 vs 2011–2015). *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(3), 213-225.
- Asri, J. D. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1021-1034.
- Basri, H., Mayesti, I., & Nurdin, N. (2019). ANALISIS PENGARUH UMP, INFLASI, IPM, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI JAMBI. *Journal Development*, 7(1), 8-14.
- Erlinda, N. (2016). *Pembangunan wilayah berkelanjutan di Provinsi Jambi dan implikasi Model Jamrud* (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Erlinda, N. (2016). Kebijakan pembangunan wilayah berkelanjutan di Provinsi Jambi

- melalui pendekatan Model FLAG. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 1-14.
- Erlinda, N., Fauzi, A., Sutomo, S., & Putri, E. I. K. (2016). Assessment of sustainable regional development policies: a case study of Jambi province, Indonesia. *Economics*, 4(5), 224-237.
- Fathiyah, F., Abdi Sukma, & Bambang Niko Pasla. (2021). Analysis of the Accuracy Level of Revenue and the Distribution Mechanism of Tax Revenue Sharing and Non-Tax Revenue Sharing for the Jambi Province Government in 2015-2019. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.16>
- Fathiyah, 2015, Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah : Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Periode Tahun Anggaran 2013 – 2014, Prosiding, Seminar Nasional Hasil penelitian 2014, LPPM Unbari
- Fathiyah, F., Sukmana, A., Majid, H., & Masnun, M. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117-122.
- Fathiyah, F. (2017). ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN RASIO KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015). *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 80-86.
- Fathiyah, F. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 12(3), 41-45.
- Farida, Ai Siti, R. Faisal Maulana Nugraha, 2019, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Subang, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol. II No. 2 Desember 2019, 107 – 129
- Handoyo, S., Anas, S., & Yudianto, I. (2019). Analysis of the financial condition West Java provincial government, Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 23(1), 33-49.
- Hardiningsih, Pancawati, Ceacilia Srimindarti, Afifah Jannah, Maria Yosaphat, Dedi Haryanto, Digitalisasi Publikasi, Laporan Keuangan, Daerah Pancawati Hardiningsih, and Afifatul Jannah. 2021. "DIGITALISASI PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH." *Jurnal Keuangan Dan Bisnis* 19(1):132–46. doi: 10.32524/JKB.V19I1.259.
- Juni, Bulan, Abdul Rahman, and Ayudhini Azzahra Permatasari. 2021. "PENGARUH KOMPETENSI SDM DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(1):14–22. doi: 10.14710/DIALOGUE.V3I1.11153.
- Karenina, Silvia, Krisna Dwi Andayani, Imanuel Andre Aditya, Mohammad Wasil, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, Mohammad Wasil Silvia Karenina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Upn Veteran, Jawa Timur, Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Kata kunci, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, and Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- Kabupaten. 2021. "Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019." *Journal of Regional Economics Indonesia* 2(1):27-41. doi: 10.26905/JREI.V2I1.6180.
- Karyatni, N. M. D., & Handajani, L. (2020). The Quality of Financial Statements Antecedents and Consequences Towards Financial Accountability. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 352-362.
- Kaunang, Cheris Enjelita, Amran T., Naukoko, dan Albert T. Londa, 2016, Analisis Kinerja Pengelolaan keuangan Daerahdan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus pada Kota Manado Tahun 2010 – 2014, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No.2.
- Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. *ACCOUNTABILITY*, 6(2), 9-19.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mahmudi, 2013, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit UII Press, Yogyakarta
- Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarak, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 2(1), 90-95.
- Monginsidi, Elsie Celvia, Rosalina A. M. Koleangan, and Debby Ch. Rotinsulu. 2021. "ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO." *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH* 20(1):15-30. doi: 10.35794/JPEKD.32775.20.1.2019.
- PASLA, B. N. (2009). *Pengaruh inteligensi emosional terhadap organizational citizenship behavior dengan kohesivitas sebagai pemediasi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Pemerintah Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 – 2020
- Pemerintah Provinsi Jambi, Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016 – 2020
- Pemerintah Provinsi Jambi, Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi TA. 2016 - 2020
- Prakoso, Jalu Aji, Fitra Sari islami, Rr. Retnosugiharti, 2019, Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Jawa Tengah, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar Vol. 4 No. 1
- Putri, R. A. ., Zamzami, Z., & Rahmadi, S. . (2021). Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 107-122. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.12858>
- PUTRA, R., WIJAYANTI, R. R., & ARDHIARISCA, O. (2020). Measurement of Regional Government Financial Performance in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 22(1), 83-94.

- Putra, Rico, dan Surya Hidayat, 2016, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3 No.4
- Rachmad, Ari. 2021. "Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lumajang." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1(1):77–98. doi: 10.53754/ISCS.V1I1.13
- Renyowijoyo, Muindro, 2010, Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Republik Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia, 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia, Jakarta
- RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(2), 115-143.
- Safitry, H. A., Luhsasi, D. I., & Permatasari, C. L. (2021). ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENT IN ASSESSING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 65-71.
- Sari, Ratna Purnama, Citra Setia Mulyani, and Dekeng Setyo Budiarto. 2020. "PENTINGNYA PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 6(1):1–10. doi: 10.26486/JRAMB.V6I1.697.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Surjono, W., & Firdaus, N. N. R. (2017). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada satuan kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) pemerintah daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1357-1368.
- Tambun, Eric Ricky, Rosalina A. M. Koleangan, and Vekie A. Rumat. 2021. "ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG." *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH* 19(4):1–14. doi: 10.35794/JPEKD.32760.19.4.2018.
- Wenny, C. D., & Ferina, I. S. (2011). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).